

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, pembangunan ekonomi di suatu negara khususnya negara berkembang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun, pada praktiknya tidak seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha serta meningkatkan produktivitas. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari Lembaga keuangan, terutama kredit, sebagai sumber permodalan usaha (Mewoh, et al., 2023).

Sejalan dengan kondisi tersebut, hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan pada kondisi perekonomian yang relatif belum stabil. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi pasca pandemi yang belum sepenuhnya pulih, serta ketidakpastian ekonomi global, menyebabkan Indonesia mengalami tantangan yang cukup besar dalam proses pemulihan ekonomi. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, inflasi yang tinggi, fluktuasi harga barang di pasar global, serta perdagangan internasional, turut memperburuk situasi ekonomi negara. Beberapa dampak yang dapat dirasakan adalah menurunnya daya beli masyarakat serta

angka pengangguran yang terus meningkat. Indonesia adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar melalui sektor pertanian, industri, jasa, dan perdagangan. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan yang cukup signifikan akibat perubahan dinamika global dan tantangan domestik (Buke et al., 2025)

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, salah satunya dengan mendorong pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu sektor yang cenderung tidak terpengaruh dan mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, UMKM memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi di Indonesia memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Kustanto, 2022). Meningkatnya kinerja UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap PDB dan mendorong penciptaan lapangan kerja (Sari dan Imaningsih, 2022.)

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha, yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Nurhalizah dan Sumarni 2025). Menurut Ismail (2023), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merujuk pada usaha yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya, yang dapat berupa kepemilikan pribadi atau bisnis. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh UMKM, karena sektor ini mampu menciptakan pendapatan dan mendistribusikannya kepada banyak pihak. Terbukti, UMKM dapat bertahan selama krisis global. Hal ini terjadi karena UMKM tidak terlalu

bergantung pada perekonomian internasional. Sebagian besar UMKM fokus pada produksi barang-barang kebutuhan pokok, bukan barang mewah, dan sebagian besar kegiatan produksi dilakukan secara independen. Selain itu, UMKM cenderung mudah beradaptasi dengan perubahan dan tidak memerlukan biaya manajemen yang tinggi.

UMKM sering menghadapi kendala utamanya masalah akses keuangan, yang membatasi kemampuan mereka untuk berkembang dan menjalankan usaha. Khoiriah et al. (2024) berpendapat bahwa pada dasarnya, UMKM menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang cukup sulit dalam mengembangkan usaha mereka. Berbagai faktor yang memengaruhi tersebut saling terkait, di antaranya adalah keterbatasan modal, baik dalam jumlah maupun sumber daya yang tersedia, serta kurangnya kemampuan dalam manajemen dan keterampilan operasional.

Banyaknya UMKM yang membutuhkan bantuan pembiayaan, membuat berbagai lembaga keuangan, menawarkan layanan pembiayaan kepada para pelaku usaha. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah bank. Namun, terdapat sejumlah keluhan dari pelaku usaha karena kesulitan memperoleh kredit dari bank. Melihat pertumbuhan UMKM yang pesat, namun kesulitan dalam mendapatkan dukungan modal, maka pemerintah melalui kebijakan fiskalnya berusaha memberikan dukungan pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha UMKM. Salah satu kebijakan fiskal yang diambil pemerintah untuk membantu UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal, adalah dengan menetapkan sebuah program yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada tahun 2007 sebagai tanggapan terhadap Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, yang bertujuan agar penyaluran kredit dapat tersebar secara merata (Mewoh et al., 2023).

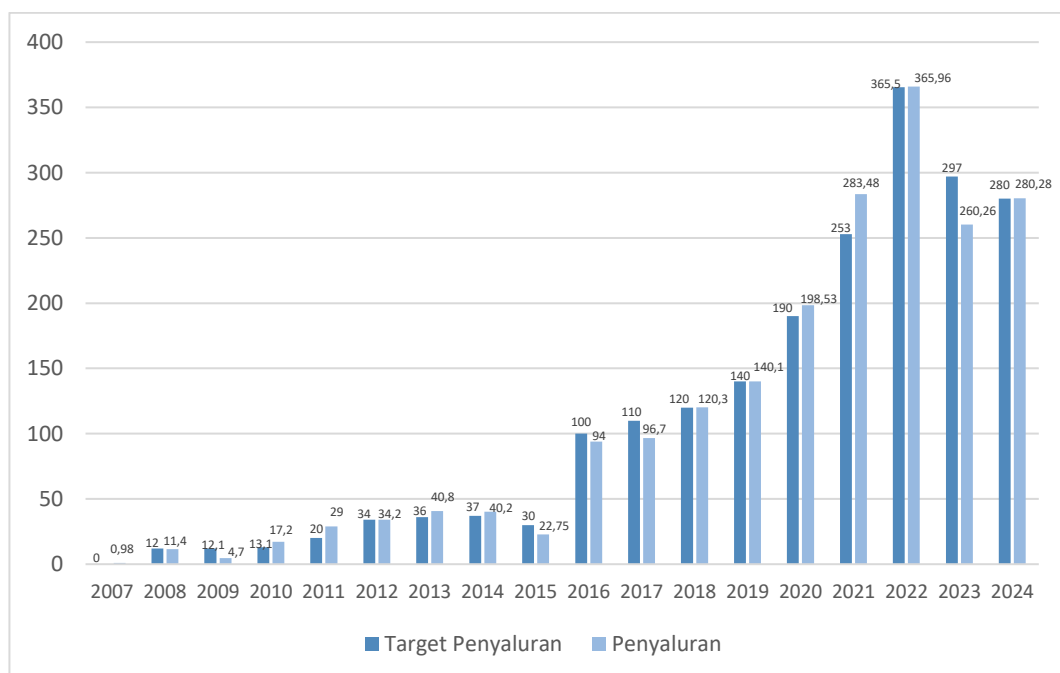
Program kredit usaha rakyat dibuat sebagai solusi pembiayaan untuk para pelaku usaha dengan tujuan agar usaha mereka lebih berkembang dan berdaya saing. Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja lebih luas (Malelak et al., 2020).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan tambahan modal. Melalui program ini, UMKM dapat berkembang lebih pesat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor UMKM. Oleh karena itu, KUR terbukti sangat efektif dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu keunggulan utama program ini adalah suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit komersial lainnya, sehingga menjadikan KUR sebagai solusi yang optimal bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan pembiayaan untuk usaha mereka (Mustofa, 2024).

Kredit Usaha Rakyat telah diberlakukan sejak tahun 2007 dengan KUR menggunakan skema penjaminan kredit hingga tahun 2014. Metode ini kemudian diubah pada 2015 menjadi subsidi bunga. Perubahan skema ini bertujuan untuk menekan risiko gagal bayar serta mempermudah Nasabah dalam membayar bunga. Penurunan suku bunga yang signifikan (dari 24% menjadi 7%) setelah penerapan skema subsidi bunga, turut mempengaruhi fluktuasi pada permintaan KUR. Perubahan suku bunga KUR dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi, seperti suku bunga pasar dan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Dengan kata lain, fluktuasi permintaan KUR dipengaruhi oleh perubahan kebijakan suku bunga, yang berdampak langsung pada akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta kelangsungan usaha mereka (Aristanto, 2020).

Suku bunga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah permintaan kredit usaha rakyat karena, karena suku bunga yang tinggi akan menyebabkan beban pelunasan kredit yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin besar. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah menetapkan subsidi suku bunga KUR, yang berarti pemerintah akan menanggung sebagian dari bunga yang dibayar oleh nasabah (Sari dan Imaningsih, 2022). Dilansir dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, permintaan KUR terus mengalami fluktuasi. Fluktuasi permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sering terjadi seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah gambaran perkembangan KUR selama 18 tahun terakhir, dari tahun 2007 hingga 2024.

Gambar 1.2 Target Penyaluran dan Penyaluran KUR Tahun 2007-2024



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Grafik di atas menunjukkan fluktuasi penyaluran KUR yang kadang melebihi target penyaluran, namun di sisi lain, juga kadang tidak tercapai sesuai

dengan target. Hal ini mencerminkan bahwa permintaan terhadap KUR dapat berubah-ubah dari tahun ke tahun, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelaku usaha akan pembiayaan. Pada periode tertentu, terdapat lonjakan permintaan yang tinggi, sementara pada periode lainnya, permintaan cenderung lebih rendah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi permintaan kredit usaha rakyat, seperti perubahan kondisi ekonomi, serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2015, permintaan kredit usaha rakyat mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 56%. Yang semula pada tahun 2014 permintaan KUR sebesar 40,2 triliun rupiah, turun menjadi 22,75 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah yang mengubah metode KUR yang sebelumnya menggunakan skema penjaminan kredit, kemudian diubah menjadi kebijakan suku bunga. Pada tahun 2015, suku bunga yang ditetapkan pemerintah sebesar 12%. Sebagai langkah strategis untuk mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pada Januari 2016, pemerintah kembali menurunkan bunga KUR menjadi menjadi 9% (Sumantika dan Ardiyanto, 2018). Penurunan bunga KUR kemudian terus berlanjut, hingga mencapai angka 6% pada tahun 2020 hingga 2024.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan kredit adalah suku bunga kredit KUR itu sendiri, jumlah nasabah dan pertumbuhan PDB (Nurjanah dan Suryantini, 2019). Bosawer (2024) menyatakan bahwa faktor internal bank tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR pada sektor agribisnis. Sebaliknya, penyaluran KUR lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro, yang meliputi suku bunga KUR dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tinggi rendahnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Besarnya suku bunga yang dikenakan oleh bank pada berbagai jenis kredit, sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali bank. Oleh karena itu, semakin rendah suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank, semakin besar permintaan kredit dari nasabah, dan sebaliknya. Salah satu langkah yang diambil oleh bank adalah dengan menetapkan suku bunga kredit yang sesuai, sehingga bantuan pembiayaan yang disalurkan dapat diterima oleh masyarakat dan pada saat yang sama dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Sujai dan Sutriani, 2020).

Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada tahun 2015 tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar 12%, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 9%. Tingkat suku bunga ini tidak berubah hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, suku bunga KUR mengalami penurunan lagi menjadi 7% dan berlaku hingga tahun 2019. Untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha, pada tahun 2020, pemerintah kembali menurunkan suku bunga KUR menjadi 6%, dan tingkat suku bunga ini tetap bertahan hingga tahun 2024.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara, karena PDB menyajikan ringkasan dari seluruh aktivitas ekonomi dalam bentuk nilai moneter dalam periode waktu tertentu. PDB menggambarkan secara menyeluruh total produksi barang dan jasa di suatu negara, sehingga menjadi tolok ukur yang efektif untuk menilai tingkat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi suatu negara. Peningkatan PDB merupakan indikator positif bagi sektor riil, yang mencerminkan bahwa ketika daya beli masyarakat meningkat, pelaku ekonomi cenderung

berupaya untuk memperluas usahanya. Ekspansi usaha tersebut dapat dilakukan melalui permohonan kredit kepada lembaga keuangan, salah satunya dengan mengajukan kredit perbankan. Dengan demikian, peningkatan PDB akan mendorong peningkatan penyaluran kredit seiring dengan meningkatnya aktivitas dan gairah sektor riil (Putra, 2018; Mankiw, 2000).

Nasabah yang terlibat dalam program KUR sebagian besar terdiri dari pelaku usaha mikro yang memiliki beragam jenis usaha. Mereka mewakili berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan kecil, manufaktur, hingga sektor jasa, yang semuanya berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Setiap kelompok usaha tersebut memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pemberian kredit kepada nasabah ini harus disesuaikan dengan jenis usaha serta potensi perkembangan masing-masing. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi sarana yang efektif untuk memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal dari sumber pembiayaan konvensional. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, nasabah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka, memperbaiki produktivitas, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Budiman dkk, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suku bunga, pertumbuhan PDB, dan jumlah nasabah merupakan faktor-faktor yang penting dalam memengaruhi permintaan Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengukur seberapa besar pengaruh variable-variabel tersebut di atas terhadap permintaan KUR di Indonesia Tahun 2007-2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneltian ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkapkan permasalahan:

1. Apakah suku bunga KUR berpengaruh terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024?
2. Apakah Pertumbuhan PDB berpengaruh terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024?
3. Apakah Jumlah Nasabah berpengaruh terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024?
4. Apakah suku bunga KUR, Pertumbuhan PDB, dan jumlah nasabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga KUR terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan PDB terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Nasabah terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga KUR, Pertumbuhan PDB, dan jumlah nasabah terhadap permintaan KUR di Indonesia periode 2007-2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Dapat menjadi sumber informasi bagi UMKM terkait pengaruh menggunakan Kredit Usaha Rakyat sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui manfaat menggunakan KUR serta sebagai bahan

masukannya bagi pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan KUR.

2. Dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang hubungan suku bunga, pertumbuhan PDB dan Nasabah terhadap permintaan kredit.
3. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademi yang ingin melakukan penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Menurut Creswell (2018) dalam Nursulis dan Muspawi (2024), landasan teori membantu penelitian agar berada dalam konteks yang lebih luas dan berkontribusi pada pengembangan teori yang ada. Penelitian berbasis teori memungkinkan peneliti untuk memperluas atau memodifikasi teori berdasarkan temuan baru. Melalui landasan teori, penelitian tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkaya literatur ilmiah dan mengembangkan teori yang ada.

##### **2.1.1 Teori Permintaan Kredit**

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Begitu pula dengan permintaan kredit yang merupakan keinginan nasabah untuk mengajukan kredit kepada Lembaga Keuangan, pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Grand Theory yang dapat menjelaskan terkait permintaan kredit adalah teori *loanable funds* yang dikemukakan oleh Knut Wicksell. Teori lainnya yang mendukung adalah Teori Permintaan Kredit – Keynes, teori permintaan kredit - Irving Fisher, dan Teori Ekonomi Makro tentang Permintaan Kredit - James Tobin.

Teori *loanable funds* dikembangkan oleh Knut Wicksell pada tahun 1898. Teori *loanable funds* (Wicksell) memandang suku bunga sebagai harga pinjaman. Penurunan suku bunga menurunkan biaya modal sehingga meningkatkan permintaan dana pinjaman, sedangkan kenaikan suku bunga menekan permintaan kredit. Hal ini sejalan dengan spesifikasi permintaan kredit Suriani dan Seftarita (2022) yang memodelkan permintaan kredit sebagai fungsi PDRB dan

suku bunga, dengan arah teoritis suku bunga yang menurunkan permintaan kredit serta PDRB yang meningkatkan permintaan kredit. Teori ini berfokus pada cara kerja pasar uang seperti kredit dan bagaimana suku bunga berfungsi sebagai nilai yang mengatur keseimbangan antara penawaran dan permintaan dana yang diperdagangkan antara nasabah (peminjam) dan pemberi pinjaman. Teori *loanable funds* menyatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan atas dana pinjaman di pasar. Suku bunga berfungsi untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kredit, terkait bagaimana nasabah membutuhkan modal pembiayaan untuk suatu kegiatan perekonomian dan bagaimana Lembaga keuangan menyediakan dana untuk dipinjamkan.

Menurut teori *Loanable Funds*, suku bunga merupakan harga dari pinjaman. Ketika suku bunga KUR rendah, maka biaya untuk meminjam menjadi lebih murah bagi nasabah. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, biaya pinjaman lebih mahal dan permintaan kredit cenderung menurun. Ketika suatu program kredit menawarkan suku bunga yang rendah maka akan meningkatkan permintaan kredit. Dalam teori *Loanable Funds*, ketika pertumbuhan ekonomi atau PDB meningkat, berarti kondisi ekonomi berada dalam keadaan baik sehingga meningkatkan permintaan kredit karena lebih banyak peluang investasi dan pengembangan usaha yang membutuhkan modal. Dengan kata lain, Ketika perekonomian Indonesia tumbuh maka permintaan kredit akan naik karena pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan, akan lebih tertarik untuk mengajukan pinjaman (Suriani dan Seftarita, 2022).

Teori *loanable funds* menjelaskan bahwa semakin banyak dana yang tersedia di pasar, semakin banyak juga pelaku usaha yang akan mengakses kredit. Jumlah nasabah menggambarkan banyaknya pelaku usaha yang memiliki akses untuk meminjam dan memanfaatkan kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inti teori *loanable funds* adalah Ketika Suku bunga kredit rendah, maka permintaan

kredit akan meningkat karena biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau. Pertumbuhan PDB yang tinggi akan mendorong peningkatan permintaan kredit karena ada lebih banyak peluang usaha yang membutuhkan pembiayaan. Peningkatan jumlah nasabah berarti terdapat banyak UMKM yang mengakses kredit, sehingga terjadi peningkatan permintaan kredit.

Salah satu teori yang dapat mendukung teori loanable funds untuk menjelaskan terkait permintaan kredit adalah Teori Permintaan Kredit – Keynes. Dalam teori Keynes, permintaan kredit terkait erat dengan tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Keynes berpendapat bahwa permintaan kredit dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan oleh sektor usaha, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh biaya pinjaman atau suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, biaya peminjaman menjadi lebih mahal, yang dapat menurunkan permintaan terhadap kredit. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, biaya pinjaman menjadi lebih rendah, yang dapat mendorong perusahaan dan individu untuk meminjam lebih banyak untuk investasi atau konsumsi (Anwar, 2016).

Irving Fisher dalam teorinya terkait permintaan kredit, mengemukakan bahwa Suku Bunga: Fisher, dalam teori perubahan suku bunga (Interest Rate Theory), mengemukakan bahwa suku bunga adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi permintaan kredit. Fisher menjelaskan bahwa ketika suku bunga rendah, biaya pinjaman menjadi lebih murah, yang cenderung meningkatkan permintaan kredit. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, permintaan kredit cenderung menurun karena biaya pinjaman yang lebih mahal. Dalam teori ini, Ketika PDB meningkat, aktivitas ekonomi juga meningkat, yang mendorong permintaan kredit. PDB yang lebih tinggi berarti ada lebih banyak peluang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan memerlukan pembiayaan kredit. Sementara itu, semakin banyak usaha yang dapat mengakses kredit, semakin besar kemungkinan permintaan kredit meningkat, terutama jika suku bunga rendah dan

pertumbuhan ekonomi baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam teori Fisher yang terkait dengan pengaruh suku bunga terhadap permintaan kredit terbukti berlaku dalam studi empiris di sektor properti Indonesia. Suku bunga rendah mendorong permintaan kredit meningkat karena biaya pinjaman yang lebih rendah, sementara suku bunga tinggi menurunkan permintaan kredit. Begitu juga dengan PDB yang meningkat, menciptakan lebih banyak peluang untuk berinvestasi dan mempengaruhi permintaan kredit secara positif (Putra dan Wasiaturrahma, 2021).

Teori pendukung yang terakhir adalah Teori Ekonomi Makro tentang Permintaan Kredit yang dikemukakan oleh James Tobin. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk mengajukan kredit sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Individu atau perusahaan akan membandingkan keuntungan dari investasi yang didanai dengan kredit (dengan memperhitungkan suku bunga) dengan hasil yang bisa diperoleh dari aset lainnya. Ketika suku bunga rendah, permintaan kredit lebih tinggi karena biaya pinjaman yang lebih murah mendorong lebih banyak investasi atau ekspansi usaha. Dari sisi PDB, teori ini berpendapat bahwa PDB yang lebih tinggi memperkuat hubungan dalam model Tobin, karena pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peluang investasi akan lebih banyak dan, dengan demikian, permintaan kredit juga akan meningkat. Dalam kaitannya dengan jumlah nasabah, teori ini menjelaskan bahwa semakin banyak pelaku ekonomi yang mengakses pasar kredit, semakin besar kemungkinan mereka akan menggunakan kredit untuk membiayai investasi. Bila suku bunga turun maka biaya modal rendah yang mendorong permintaan kredit meningkat. Kondisi rendahnya suku bunga dapat mendorong lebih banyak pengajuan kredit oleh pelaku usaha (nasabah) (Lin, et. al. 2018).

Dalam ilmu ekonomi, permintaan diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membeli suatu produk pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu, dan keinginan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Permintaan pasar

menggambarkan jumlah barang atau jasa yang dicari di pasar. Jika terjadi peningkatan harga dan pendapatan dalam periode waktu tertentu, hal ini berarti terdapat peningkatan permintaan (Zuwardi et al. 2023).

Menurut Sukirno dalam Titu et al. (2023), Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga di pasar dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian, teori permintaan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara permintaan barang atau jasa dengan harga yang berlaku selama periode waktu tertentu.

Permintaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah permintaan dari semua konsumen individu. Salah satu faktor yang memengaruhi permintaan adalah harga produk itu sendiri, sementara faktor lain seperti selera, pendapatan, dan faktor lainnya dianggap tetap atau *ceteris paribus* (Rompas 2018).

Pada teori permintaan, naik atau turunnya permintaan barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan barang atau jasa menurut Titu et al. (2023) sebagai berikut:

- a. Harga Barang Itu Sendiri. Jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang menurun, permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Hubungan antara harga barang dan permintaan bersifat negatif, dengan asumsi faktor lainnya tetap konstan (*ceteris paribus*).
- b. Harga Barang lain. Harga barang lain juga dapat memengaruhi permintaan suatu barang. Perubahan harga pada satu barang dapat memengaruhi permintaan barang lainnya jika kedua barang tersebut memiliki hubungan, yaitu sebagai barang pengganti (*substitusi*) atau barang pelengkap (*komplementer*). Barang substitusi adalah jenis barang yang dapat

menggantikan fungsi barang lainnya, sementara barang komplementer adalah jenis barang yang dapat melengkapi fungsi dari barang lain.

- c. Pendapatan Konsumen. Pendapatan konsumen adalah faktor yang sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Perubahan dalam pendapatan konsumen juga berpengaruh terhadap perubahan permintaan berbagai barang.
- d. Selera Konsumen. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang adalah selera. Konsumen cenderung tetap membeli barang tertentu meskipun harganya naik, sementara itu, konsumen tidak akan membeli barang tertentu meskipun harga barang tersebut turun jika mereka tidak memiliki minat atau selera untuk mengonsumsinya.

Hubungan antara permintaan barang dan harga dijelaskan dalam hukum permintaan, yang menyatakan: jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan berlaku dengan asumsi *ceteris paribus*, yang berarti hukum ini hanya berlaku jika faktor-faktor lain selain harga tetap konstan. Prinsip hukum permintaan tersebut relevan dalam konteks permintaan Kredit Usaha Rakyat, di mana peningkatan dan penurunan nilai suku bunga, PDB, dan jumlah nasabah akan memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam mengajukan kredit.

### **2.1.2 Kredit Usaha Rakyat**

Menurut Anwar dan Akbar (2018), kredit adalah suatu perjanjian keuangan yang memungkinkan individu atau entitas bisnis untuk meminjam uang guna membeli barang atau jasa, dengan kewajiban untuk melunasi jumlah yang dipinjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Istilah "kredit" berasal dari kata *credere*, yang berarti kepercayaan. Dalam konteks ini, memperoleh kredit

menunjukkan bahwa peminjam telah diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tersebut. Bagi pemberi kredit, memberikan kredit berarti memiliki keyakinan bahwa uang yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dari segi penggunaannya, kredit dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi pribadi atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kredit jenis ini umumnya tidak digunakan untuk tujuan bisnis atau investasi.
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk mendanai kegiatan produksi, biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional mereka, seperti memperluas kegiatan bisnis, menutupi biaya operasional, atau membeli bahan baku. Kredit bertujuan untuk meningkatkan likuiditas bisnis dan mendukung pertumbuhannya.
3. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah yang digunakan untuk pembelian barang modal dan layanan yang digunakan untuk merehabilitasi, memodernisasi, atau mendirikan usaha baru.

Kredit juga dapat diartikan sebagai pinjaman dari lembaga keuangan yang diberikan kepada perseorangan ataupun perusahaan. Sutarno (2005) dalam Rompas (2018) menjelaskan bahwa kata "kredit" berasal dari bahasa Yunani "Credere," yang berarti kepercayaan, atau dalam bahasa Latin "Credutum," yang berarti kebenaran atau kepercayaan. Jadi, seseorang yang mendapatkan kredit berarti telah dipercaya oleh bank untuk mengelola dan menerima sejumlah uang, dengan syarat bahwa uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya.

Penyaluran kredit usaha kecil acap kali menjadi perhatian utama lapisan masyarakat dalam kaitan dengan paradigma percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Permasalahan yang

sangat sering mengemuka adalah kebutuhan dana/modal bagi para pengusaha kecil dan menengah walaupun ini bukan satu-satunya masalah (Anwar, 2002).

KUR adalah salah satu kredit modal kerja yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2007 untuk mengatasi kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu keuntungan yang dirasakan oleh pelaku UMKM dari KUR adalah kemudahan dalam mengakses layanan perbankan. Secara teknis, KUR memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan perbankan. (Ulfa dan Mulyadi, 2020).

Suginam (2021) menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program kredit yang diselenggarakan melalui kerja sama pemerintah dan lembaga perbankan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah. KUR bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberi akses kepada pelaku usaha yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Melalui program ini, bank berperan sebagai penyedia modal, sementara pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih ringan. KUR membantu menciptakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas usaha, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ulfa dan Mulyadi (2020) menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan mendorong sektor perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. KUR adalah pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk modal kerja dan investasi, yang dilengkapi dengan fasilitas penjaminan

untuk usaha yang produktif. Program KUR pertama kali diluncurkan pada 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terus berlanjut hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo. KUR menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya bagi usaha yang memenuhi syarat namun belum memenuhi kriteria bankable. Artinya, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

Kredit merupakan hal yang penting untuk mendukung usaha, karena memberikan akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pengembangan. Peningkatan kegiatan di sektor keuangan, penyewaan, dan jasa bisnis seringkali didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan kredit, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk memperkuat modal usaha. Dengan demikian, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Djaman, 2014). Yang pada gilirannya akan menciptakan peluang baru bagi pengusaha untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak yang sangat positif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, KUR menjadi instrumen yang krusial dalam mengembangkan sektor UMKM dan, lebih luas lagi, mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Menurut Mustofa (2024), berdasarkan hasil penelitiannya terkait efektivitas KUR di Kabupaten Jember, beberapa pertimbangan mengapa program KUR sangat positif bagi UMKM adalah:

- a. Pembiayaan Mudah didapatkan dan Terjangkau.

Program KUR menawarkan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman komersial lainnya. Ini sangat membantu UMKM yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional karena kekurangan jaminan atau rekam jejak kredit yang baik. Dengan adanya KUR, UMKM memiliki peluang untuk

memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tanpa harus terbebani oleh biaya pinjaman yang tinggi.

b. Mendukung Pengembangan Usaha

KUR memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan skala usaha mereka. Dengan tambahan modal, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan baru, atau membuka cabang baru. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

c. Meningkatkan Daya Saing UMKM

KUR memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperbesar skala usaha mereka. Dengan tambahan modal, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan baru, atau bahkan membuka cabang baru. Pengembangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

d. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi

Program KUR mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan sektor UMKM. Melalui KUR, pemerintah memberikan dukungan konkret kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Kebijakan ini menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan semakin banyaknya UMKM yang mendapatkan dukungan melalui KUR, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dapat terjaga dengan lebih baik. UMKM yang berkembang akan meningkatkan daya beli

masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan. Ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi nasional.

Untuk memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon nasabah perlu memenuhi persyaratan administratif dan prosedural yang ditetapkan oleh bank penyalur. Informasi mengenai persyaratan tersebut umumnya dapat diperoleh melalui petugas bank ketika calon nasabah datang langsung ke kantor bank, maupun melalui sumber informasi resmi yang tersedia secara daring. Secara operasional, alur pengajuan KUR dapat dijelaskan melalui tahapan yang diterapkan oleh bank penyalur, seperti pada layanan KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai berikut:

1. Tahap awal dimulai ketika calon nasabah mendatangi atau menghubungi BRI terdekat untuk menyampaikan maksud pengajuan KUR sekaligus memperoleh penjelasan mengenai ketentuan dan dokumen yang harus dipenuhi. Setelah itu, calon nasabah mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan, antara lain fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah bagi yang telah menikah, Surat Keterangan Usaha (SKU), serta pas foto. Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar bagi bank untuk memproses permohonan secara administratif.
2. Selanjutnya, petugas bank melakukan pemeriksaan dan penilaian awal terhadap permohonan yang diajukan dengan meninjau kelengkapan berkas serta kesesuaian data calon debitur. Tahap berikutnya mencakup pengecekan riwayat kredit (BI Checking) untuk memastikan rekam jejak pinjaman calon nasabah, termasuk status kolektabilitas pembiayaan sebelumnya, apakah tergolong lancar/lunas atau masih terdapat kewajiban yang belum terselesaikan. Setelah penilaian

administratif dan riwayat kredit dinyatakan memadai, bank kemudian melaksanakan survei lapangan ke lokasi rumah dan/atau tempat usaha calon debitur guna memverifikasi keberadaan usaha serta memperoleh gambaran faktual mengenai aktivitas usaha yang dijalankan.

3. Apabila hasil evaluasi dan verifikasi menunjukkan bahwa permohonan layak untuk disetujui, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan akad kredit sebagai bentuk perjanjian formal antara bank dan debitur. Setelah akad ditandatangani sesuai ketentuan, bank melakukan pencairan pinjaman kepada debitur melalui mekanisme yang berlaku di bank penyalur. Setelah proses persetujuan kredit selesai, debitur diwajibkan menandatangani perjanjian kredit sebagai bentuk pengesahan kesepakatan antara pihak bank dan debitur. Selanjutnya, dana pinjaman akan dicairkan melalui rekening debitur yang telah dibuat oleh petugas administrasi kredit sesuai dengan prosedur yang berlaku (Suparman dan Putra, 2022).

Beberapa tujuan utama dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan atau permodalan bagi UMKM untuk memasuki sektor formal. Selain itu, KUR juga membantu UMKM agar dapat menjadi Nasabah yang memenuhi kriteria bankable, sehingga memudahkan mereka dalam memperoleh layanan komersial dari perbankan. Dengan adanya KUR, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan (Sari dan Imaningsih, 2022; Aidil, 2014).

Secara keseluruhan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan banyak manfaat positif bagi UMKM. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, mendukung pengembangan usaha, meningkatkan daya saing, serta memberikan pelatihan dan pendampingan, KUR membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Dukungan ini tidak hanya menguntungkan

pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Program KUR merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan yang inklusif di Indonesia (Mustofa, 2024).

### **2.1.3 Suku bunga KUR**

Bunga dapat dipahami sebagai kompensasi berupa pembayaran di masa depan atas penggunaan dana yang terjadi pada masa sebelumnya. Suku bunga adalah besaran bunga yang dibayarkan setiap tahun atas pinjaman dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk menabung. Ketika suku bunga meningkat, dorongan untuk menabung cenderung ikut meningkat (Nurbayani dan Rusda, 2025).

Menurut Kasmir dalam Evelyn (2022), suku bunga merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan pemasaran jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Suku bunga mengacu pada biaya yang diberikan oleh bank kepada nasabah serta biaya yang harus dibayar nasabah kepada bank. Lebih lanjut, Aryaningsih (2008) dalam Rompas (2018) menjelaskan bahwa suku bunga adalah jumlah uang yang dibayar sebagai kompensasi atas penggunaan dana. Perubahan suku bunga mempengaruhi permintaan terhadap uang (kredit). Ketika suku bunga naik, permintaan agregat atau pengeluaran investasi cenderung menurun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, permintaan agregat meningkat.

Marlinus (2020) berpendapat bahwa dalam menentukan keputusan nasabah untuk menggunakan kredit KUR yang ditawarkan, pihak perbankan memiliki kebijakan khusus dalam menetapkan suku bunga. Tujuan dari suku bunga ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dan sebagai pembanding dengan bank lain, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga serta biaya yang harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan kemampuan masyarakat

setempat. Selain itu, suku bunga yang ditetapkan juga harus sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Bank Indonesia. KUR menjadi solusi yang tepat bagi pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman modal, karena KUR tidak memerlukan jaminan dan menawarkan suku bunga yang rendah.

Tabel 2.1 Suku Bunga KUR Tahun 2007-2024

Tahun	Suku Bunga KUR/Tahun
2024	6%
2023	6%
2022	6%
2021	6%
2020	6%
2019	7%
2018	7%
2017	9%
2016	9%
2015	12%
2014	22%
2013	22%
2012	22%
2011	24%
2010	24%
2009	24%
2008	24%
2007	24%

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Tabel diatas menunjukkan suku bunga KUR dari tahun 2007 hingga 2024. Dalam 18 tahun terakhir suku bunga KUR terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 suku bunga KUR sebesar 24% sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 6%. Menurut Evelynna (2022), tingkat suku bunga merupakan persentase yang ditetapkan oleh pihak perbankan sebagai biaya untuk menarik dana dari masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga cenderung berfluktuasi mengikuti

kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Hal ini sejalan dengan perubahan suku bunga KUR di Indonesia, yang selalu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setelah mempertimbangkan situasi perekonomian negara.

Sejak diluncurkan pada tahun 2007 hingga 2014, Kredit Usaha rakyat menggunakan skema penjaminan kredit. Pada tahun 2015, terjadi perubahan pada Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, yang sebelumnya menggunakan Skema Penjaminan Kredit. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015, metode yang digunakan berubah menjadi Skema Subsidi Bunga. Skema Subsidi Bunga dalam program Kredit Usaha Rakyat yang diterapkan oleh pemerintah ini adalah bentuk intervensi yang bertujuan untuk mengurangi beban bunga yang harus dibayar oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga memberikan mereka lebih banyak keleluasaan dalam menjalankan usaha dan mendukung keberlanjutan usaha tersebut (Aristanto et al., 2020).

#### **2.1.4 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)**

Menurut Mankiw (2007) dalam Sartika (2019), PDB adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. PDB merupakan salah satu variabel ekonomi yang paling penting di antara berbagai variabel makroekonomi lainnya, yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Sukirno (2010) dalam Kurniawan (2019) juga memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda. Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Sukirno merupakan total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah selama periode tertentu (biasanya setahun). Sedangkan, pertumbuhan PDB adalah tingkat perubahan PDB riil atau PDB atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Konsep ini didasarkan pada perbedaan antara PDB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi perubahan tingkat harga, dan PDB atas dasar harga konstan yang

digunakan untuk menggambarkan perubahan output secara riil dalam bentuk volume produksi.

Menurut Husen (2012) Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah umumnya menerapkan kebijakan makroekonomi yang diarahkan pada penciptaan iklim yang kondusif bagi ekspansi aktivitas produktif para pelaku ekonomi. Dalam konteks pengukuran kinerja makro, Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama yang merepresentasikan nilai output barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara pada periode tertentu, tanpa membedakan kepemilikan faktor produksinya. PDB dibedakan menjadi dua, yaitu PDB nominal atau PDB atas dasar harga berlaku, yang mencerminkan nilai output menggunakan harga pada periode berjalan sehingga masih dipengaruhi perubahan tingkat harga. Sebaliknya, PDB riil atau PDB atas dasar harga konstan merupakan PDB yang telah disesuaikan dari pengaruh perubahan harga melalui penggunaan tahun dasar, sehingga lebih tepat untuk menilai perubahan volume produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi umumnya dianalisis melalui pertumbuhan PDB riil (atas dasar harga konstan), karena indikator ini menggambarkan peningkatan output yang sesungguhnya dari waktu ke waktu.

Landefeld (2008) menjelaskan bahwa cara pengukuran GDP dalam akun nasional, termasuk praktik mengubah nilai nominal menjadi real GDP melalui proses deflation memakai indeks harga, lalu memakai real GDP untuk membaca perubahan output antarperiode. Pertumbuhan PDB menunjukkan persentase perubahan PDB dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan PDB sebaiknya dihitung menggunakan PDB riil (harga konstan atau ADHK) karena PDB riil dibentuk melalui proses deflasi PDB nominal dengan indeks harga atau deflator PDB, sehingga angka yang dihasilkan mencerminkan perubahan volume output, bukan kenaikan nilai akibat inflasi. Sebaliknya, PDB nominal (harga berlaku atau ADHB) masih dipengaruhi perubahan harga karena dinilai menggunakan harga

pada periode berjalan. Rumus pertumbuhan PDB riil dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDB riil} = ((\text{PDB riil}_t - \text{PDB riil}_{(t-1)}) / \text{PDB riil}_{(t-1)}) \times 100$$

Keterangan:

Pertumbuhan PDB riil (%): persentase pertumbuhan PDB

PDB riil<sub>t</sub>: nilai PDB riil pada periode t atau tahun berjalan

PDB riil<sub>(t-1)</sub>: nilai PDB riil pada periode sebelumnya.

Keadaan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan PDB negara tersebut. PDB yang tumbuh pesat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan penjualan, yang dapat menaikkan keuntungan dan harga saham, sehingga nilai perusahaan juga bisa terdorong naik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, baik domestik maupun asing. (Sartika et al., 2019).

### **2.1.5 Nasabah**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri. Usaha mikro sebagai usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha milik perorangan. Artinya, usaha mikro biasanya lahir dari aktivitas ekonomi rumah tangga atau individu, dengan kendali usaha berada pada pemilik langsung. usaha kecil dijelaskan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah maupun usaha besar. Jadi, penekanan utamanya ada pada kemandirian usaha dan tidak adanya hubungan kepemilikan atau pengendalian dengan bisnis yang lebih besar. usaha menengah juga dipahami sebagai usaha yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha, dan tidak menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil maupun

usaha besar. Dengan kata lain, usaha menengah tetap masuk kelompok UMKM karena skalanya belum masuk kategori besar, tetapi secara struktur ia tetap independen (Maulida dan Yunani, 2017). Keberlangsungan dan pengembangan UMKM tidak lepas dari dukungan pembiayaan. Kebutuhan tersebut mendorong UMKM memanfaatkan layanan pembiayaan, salah satunya melalui fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Keterlibatan UMKM dalam penggunaan fasilitas kredit tersebut menjadikan pelaku UMKM sebagai nasabah.

Nasabah merujuk pada individu atau badan usaha yang memanfaatkan layanan lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga pembiayaan, untuk berbagai kebutuhan finansial, antara lain menyimpan dana, meminjam dana, serta menggunakan layanan perbankan lainnya seperti transfer atau pembayaran. Dalam konteks kredit, nasabah adalah pihak yang mengajukan permohonan dan menerima fasilitas kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan (Yahya et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Nasabah Penyimpan, yang merujuk pada individu atau badan hukum yang menempatkan dana mereka di bank dalam bentuk simpanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank.
2. Nasabah Debitur, yang mengacu pada individu atau badan hukum yang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank, baik yang bersifat konvensional maupun berbasis prinsip syariah, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama antara nasabah dan bank tersebut.

Nasabah dipandang sebagai pihak yang terjalin hubungan dengan bank, baik dalam aspek penyerahan dana yang disimpan di bank maupun penggunaan dana tersebut dalam bentuk kredit. Selain itu, definisi nasabah juga mencakup pertimbangan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh bank. Kualitas

layanan ini memiliki peranan yang sangat penting, karena meliputi dimensi-dimensi seperti tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, yang secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah. Kepuasan ini, pada gilirannya, dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk terus menggunakan layanan yang disediakan oleh bank tersebut (Nurmaulia dan Sunindyo, 2019).

Sebagai pihak yang menerima fasilitas kredit, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam skema pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang. Selanjutnya, konsumen sebagai nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut untuk membeli barang tertentu dan berkewajiban melunasi utangnya kepada perusahaan pembiayaan melalui pembayaran secara berkala dalam bentuk angsuran. Di sisi lain, penjual atau pemasok (supplier) menyediakan barang yang dibeli, dengan pembayaran dilakukan secara lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kondisi tertentu, perjanjian pinjaman dapat dilakukan secara lisan antara para pihak tanpa dituangkan dalam kontrak tertulis, sehingga pembuktiannya sering kali hanya didasarkan pada kwitansi atau tanda terima pembayaran. Adapun objek atau barang yang dijadikan jaminan umumnya ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai maupun besaran pinjaman yang diberikan (Yusmita et al., 2019).

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari nasabah UMKM menurut Yahya et al., (2023), sebagai berikut:

1. Suku Bunga. Suku bunga menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh UMKM saat mengajukan kredit. Suku bunga yang rendah membuat

pinjaman lebih terjangkau dan menarik, yang mendorong UMKM untuk mengajukan KUR guna mendukung ekspansi usaha, pembelian peralatan, atau modal kerja.

2. **Administrasi dan Pelayanan.** Kualitas dan efisiensi proses administratif serta pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan memainkan peran penting dalam keputusan UMKM untuk mengajukan KUR. Proses aplikasi yang rumit atau memakan waktu dapat mengurangi minat UMKM untuk mengakses kredit. Sebaliknya, layanan yang efisien, sederhana, dan cepat membangun kepercayaan dan mendorong pengajuan kredit.
3. **Lingkungan/Rekomendasi.** Rekomendasi dari mitra bisnis, pelanggan, atau instansi pemerintah dapat mempengaruhi keputusan UMKM untuk mengajukan kredit. Lingkungan bisnis yang mendukung juga berperan penting dalam hal ini. Rekomendasi positif dapat meningkatkan kepercayaan pada lembaga pemberi pinjaman dan program KUR.
4. **Jangka Waktu Angsuran.** Panjang periode pembayaran pinjaman juga dapat memengaruhi permintaan KUR. Jangka waktu yang lebih panjang menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran angsuran, sehingga kredit menjadi lebih menarik bagi pengelolaan kas dan perencanaan investasi UMKM.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

Operasionalisasi variabel dalam penelitian merupakan langkah krusial untuk menjelaskan secara rinci bagaimana konsep-konsep teoretis yang abstrak, seperti motivasi, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, atau efektivitas metode pengajaran, dapat diukur atau diamati. Proses ini dilakukan dengan menentukan jenis, indikator, dan skala yang relevan untuk masing-masing variabel yang diteliti. Sebagai contoh, dalam penelitian, variabel dapat dioperasionalkan dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat motivasi siswa. Indikator yang

digunakan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan tingkat keinginan siswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik. Dengan demikian, operasionalisasi variabel memfasilitasi pengumpulan data yang valid dan reliabel, yang pada gilirannya meningkatkan akurasi dan keandalan hasil penelitian (Lasmita dan Muspawi, 2024). Dalam penelitian ini, akan dianalisis pengaruh Suku Bunga KUR ( $X_1$ ), pertumbuhan PDB ( $X_2$ ) dan jumlah nasabah ( $X_3$ ) dalam mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat (Y) di Indonesia.

### **2.2.1 Hubungan Suku Bunga KUR dengan Permintaan KUR**

Tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap permintaan kredit. Artinya, semakin tinggi suku bunga, semakin rendah permintaan terhadap kredit. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kredit sangat elastis, di mana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi keputusan individu atau perusahaan dalam mengajukan pinjaman. Ketika suku bunga naik, biaya untuk meminjam uang juga meningkat, yang cenderung mengurangi minat orang untuk mengambil kredit. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat membuat kredit lebih terjangkau, sehingga mendorong permintaan kredit (Rompas, 2018).

Kredit Usaha rakyat memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Melalui KUR, pemerintah membantu usaha kecil dan menengah dengan memberikan akses lebih mudah ke pinjaman dengan bunga yang rendah. Bunga KUR yang rendah dapat membantu pengembangan usaha tanpa kelimpungan memikirkan bunga kredit yang tinggi.

Tingkat suku bunga KUR sangat mempengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk menggunakan bantuan Kredit Usaha Rakyat. Apabila suku bunga KUR ( $X_1$ ) semakin rendah, maka Permintaan KUR (Y) yang akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya jika suku bunga KUR ( $X_1$ ) tinggi, maka Permintaan KUR (Y) akan berkurang. Hal ini terjadi karena besarnya jumlah yang harus dibayar kembali oleh pelaku UMKM kepada Bank nantinya akan dipengaruhi oleh besarnya suku bunga.

Dengan rendahnya suku bunga, maka akan mengurangi beban UMKM ketika membayar kembali KUR kepada bank. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agilwaseso dalam Marlinus (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara suku bunga terhadap keputusan pengambilan kredit. Karena pendapatan penjual akan dipengaruhi oleh besarnya suku bunga yang harus dibayarkan kembali kepada Bank. Oleh karena itu, dalam penelitian ini suku bunga KUR ( $X_1$ ) disertakan sebagai variabel independen.

### **2.2.2 Hubungan Pertumbuhan PDB dengan Permintaan KUR**

Pertumbuhan PDB dan pengambilan kredit memiliki hubungan yang searah. Pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan kredit. Ketika PDB meningkat, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut dalam kondisi yang baik. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank. Kenaikan PDB ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada kenaikan pendapatan petani, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan meningkatnya nominal PDB, permintaan terhadap kredit pun cenderung mengalami kenaikan.

Menurut Choi (2021) salah satu faktor yang memengaruhi permintaan kredit adalah pertumbuhan PDB. Kenaikan PDB mencerminkan ekspansi aktivitas produksi dan transaksi di sektor riil, sehingga pelaku usaha cenderung meningkatkan kebutuhan pendanaan untuk modal kerja dan pengembangan usaha; akibatnya, permintaan kredit bergerak searah dengan pertumbuhan PDB dan menunjukkan hubungan positif. Dengan kata lain, ketika ekonomi tumbuh, penyerapan pembiayaan perbankan juga cenderung meningkat karena perusahaan merespons peluang pasar dan kebutuhan operasional yang lebih besar melalui penambahan permintaan pinjaman. Pertumbuhan PDB riil berpengaruh positif terhadap permintaan kredit, karena ketika aktivitas ekonomi

meningkat, kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan ekspansi usaha ikut naik sehingga permintaan kredit cenderung bergerak searah dengan pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, dalam penelitian ini PDB ( $X_2$ ) dimasukkan sebagai variabel independen.

### **2.2.3 Hubungan Nasabah dengan Permintaan KUR**

Nasabah dan permintaan KUR memiliki hubungan yang searah. Ketika terjadi peningkatan Nasabah, maka permintaan terhadap KUR juga akan meningkat. Dalam konteks KUR, Nasabah adalah pihak (perorangan/badan usaha/kelompok usaha) yang mengajukan dan/atau menerima fasilitas kredit/pembiayaan dari bank penyalur untuk tujuan usaha produktif. Bank penyalur (mis. BRI) mendefinisikan KUR sebagai kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Nasabah yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan yang memadai (unbankable).

Jumlah nasabah KUR memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Program ini tidak hanya membantu dalam penyediaan modal, tetapi juga berperan dalam memperkuat struktur ekonomi lokal dengan menciptakan lebih banyak peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program KUR, dengan desainnya yang tepat, terbukti menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan sektor UMKM di Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berpotensi namun belum memenuhi kriteria ketat dari perbankan tradisional. Melalui KUR, pelaku usaha mikro diberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah dan prosedur yang lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi (Budiman, dkk. 2023).

Pentingnya nasabah dapat dilihat dari peran nasabah sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan pemerintah dalam mempercepat pemberdayaan UMKM melalui skema kredit yang terjangkau. Dengan adanya KUR, pelaku usaha mikro memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal dan nasional. Program ini juga memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan profitabilitas usaha mikro, yang tercermin dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas program KUR dalam aspek ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit, dan prosedur berhubungan langsung dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh nasabah.

### **2.3 Penelitian Empiris**

Penelitian terdahulu sangat penting dalam penulisan sebuah karya tulis. Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat menemukan hal-hal yang belum terjawab, pendekatan yang belum diterapkan, atau teori yang belum diuji. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya duplikasi atau pengulangan penelitian yang sudah ada. Penelitian sebelumnya juga membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi baru dan relevan dalam bidang keilmuan tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi validitas dan kekuatan teori-teori yang telah ada. Dengan membandingkan berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan karya akademik lainnya, peneliti dapat mengetahui keabsahan karya tulis tersebut sebagai dasar penelitian (Nursulis dan Muspawi, 2024). Penelitian Mengenai Permintaan Kredit Usaha sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan Analisis Permintaan Kredit Usaha Rakyat.

Mewoh, et al. (2023) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bahu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan dampak suku bunga terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Variabel yang digunakan adalah suku bunga dan permintaan kredit usaha rakyat. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bahu, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari penelitian ini hanya sebesar 5,3%. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa, suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit usaha rakyat. Perubahan tingkat suku bunga, baik ketika mengalami penurunan ataupun kenaikan, tidak memberikan dampak signifikan terhadap permintaan KUR. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa nasabah cenderung tidak terlalu mempermasalahkan besaran suku bunga, selama tidak terjadi lonjakan yang drastis. Kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usaha menjadi faktor utama yang mendorong nasabah untuk tetap mengajukan Kredit Usaha Rakyat.

Hafsa dan Sabir (2025) melakukan penelitian berjudul Determinan Permintaan Kredit Usaha Rakyat Di Perkotaan, menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Yang diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar, Indonesia. Variabel independennya adalah permintaan KUR, sedangkan variable dependennya adalah suku bunga, nilai agunan, pendapatan, dan jangka waktu kredit. Penelitian ini fokus pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan bagaimana pelaku usaha mengakses pembiayaan melalui program KUR. Dalam penelitian tersebut, belum dibahas mengenai pertumbuhan PDB sebagai variabel independen. Sehingga dalam penelitian ini dimasukkan variabel pertumbuhan PDB karena merupakan variabel makroekonomi yang penting untuk memahami permintaan kredit secara agregat, sementara jurnal tersebut lebih fokus pada faktor-faktor mikro.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Rompas pada tahun 2018, dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit Pada Perbankan di Kota Manado. Hasil penelitian Mewoh pada tahun 2023, yaitu suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit. Sedangkan Rompas menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap permintaan kredit. Hasil tersebut didapatkan melalui penelitian di perbankan Kota Manado, dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan nilai  $t$  hitung  $-2.643 > t$  table  $(16, 0.05)$  1.7459. Yang suku bunga berpengaruh negatif namun signifikan terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado.

Setiawan, et al., (2023) melakukan penelitian terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Maluku. penelitian berjudul Dimensi penawaran, permintaan, serta penetrasi kredit usaha rakyat dan ultra mikro wilayah Maluku serta pengaruh pada indeks pembangunan manusia sektor ekonomi yang bertujuan menguji keterkaitan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan IPM khususnya dimensi pengeluaran/ekonomi sekaligus membaca dinamika penawaran–permintaan serta “awareness” publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pendekatan statistika serta pendekatan sentiment masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2015-2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) sektor pengeluaran memiliki korelasi positif dan signifikan dengan PDRB per kapita wilayah Maluku serta penyaluran KUR dan UMi milik pemerintah. Selain itu, terdapat faktor yang berkorelasi cukup tinggi atas nilai penyaluran KUR milik pemerintah yakni jumlah koperasi di wilayah Maluku.

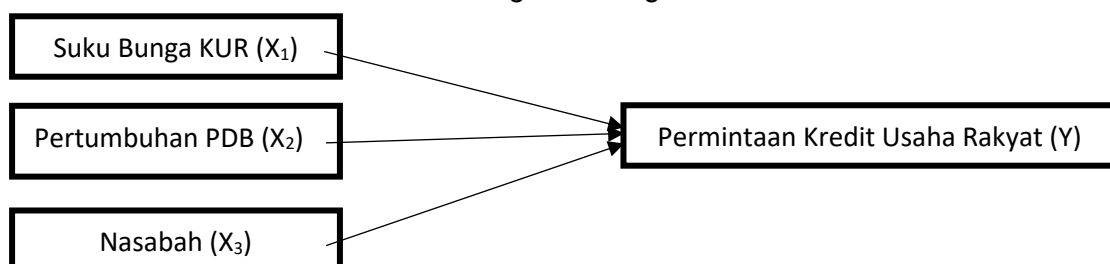
## **2.4 Kerangka Pikir**

Kredit Usaha Rakyat adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman

tunai dalam satuan rupiah. Program ini disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan dana tambahan pinjaman untuk usaha mereka (Suginam et al. 2021). Terdapat beberapa faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan KUR, diantaranya adalah suku bunga KUR, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan jumlah nasabah. Peningkatan suku bunga KUR akan menyebabkan penurunan permintaan KUR. Sebaliknya, penurunan suku bunga KUR akan mendorong peningkatan permintaan KUR perbankan dari masyarakat, karena biaya yang lebih rendah. Tingginya pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sedang berada dalam keadaan yang baik. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk memperluas usaha mereka dengan cara meminjam modal dari bank. Akibatnya, permintaan terhadap kredit akan mengalami peningkatan. (Putra, 2018). Selanjutnya, jumlah nasabah mencerminkan luasnya jangkauan program KUR dan tingkat partisipasi UMKM dalam mengakses pembiayaan kredit. Peningkatan jumlah nasabah menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal, sehingga permintaan KUR cenderung meningkat. Sebaliknya, penurunan jumlah nasabah berarti melemahnya partisipasi UMKM dalam mengakses KUR yang berpotensi menekan permintaan KUR.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk memahami hubungan antara Suku Bunga KUR ( $X_1$ ), Pertumbuhan PDB ( $X_2$ ), serta Nasabah ( $X_3$ ) dengan Permintaan KUR ( $Y$ ), maka ilustrasi kerangka pikir penulis dalam penelitian ini adalah seperti gambar berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian



## 2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Artinya, tingkat kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji oleh peneliti secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa suku bunga KUR berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit usaha rakyat (KUR) di Indonesia tahun 2007-2024.
2. Diduga bahwa pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat (KUR) di Indonesia tahun 2007-2024.
3. Diduga bahwa jumlah nasabah berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat (KUR) di Indonesia tahun 2007-2024.
4. Diduga secara simultan variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit usaha rakyat (KUR) di Indonesia tahun 2007-2024.

